

## Tol Kaltim Terganjil Penggunaan Lahan Hutan Lindung

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum belum bisa memastikan kelanjutan pembangunan tol Balikpapan-Samarinda (Kaltim), meski pemerintah telah menganggarkan dana pembebasan lahan hingga Rp 2 triliun sejak 2011. Pembangunan jalan tol tersebut dengan desain *elevated* (melekat) juga tak bisa dilakukan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali mengungkapkan, kelanjutan pembangunan tol tersebut terganjal oleh proses pembebasan lahan yang melewati hutan lindung Bukit Suharto dan Manggar.

"Berdasarkan ketentuan Kementerian Kehutanan, di lahan kawasan hutan lindung itu tidak boleh dibangun proyek," kata dia sesuai rapat dengar pendapat Dijen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (12/6).

BPJT, lanjut dia, telah diminta pendapat oleh Pemprov Kaltim agar kelanjutan jalan bebas hambatan satu-satunya di Pulau Borneo itu dapat segera dibangun. Namun begitu, BPJT meminta agar kendala pembebasan lahan dapat diselesaikan antara Pemprov Kaltim dan Kementerian Kehutanan.

"Perubahan trase bisa saja dilakukan. Akan tetapi, *internal rate of return* (IRR) bisa menjadi lebih tinggi, sehingga nantinya menjadi tidak layak secara bisnis," papar Gani.

Karena tidak adanya kepastian penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan tol tersebut, pemerintah tidak bisa mengumumkan pembangunan tersebut. "Sampai sekarang belum ada *market sounding* karena pembebasan lahannya tidak jelas," tambah Gani.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bi-

na Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengakui, proses pembangunan jalan tol tersebut sulit dilakukan dikarenakan pembebasan lahan bakal sulit. Akibatnya, trase jalan bebas hambatan itu juga tidak bisa dibuat.

"Trasena sendiri belum bisa ditetapkan," ujar dia saat rapat tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Keterpaduan Pembangunan Taufik Widodo menambahkan, masalah perizinan penggunaan lahan hutan merupakan salah satu hambatan dalam pembangunan tol sepanjang 99 kilometer tersebut. Namun, pemerintah berupaya membantu agar pembangunan tol itu bisa dibangun.

"Terkait izin penggunaan hutan, tim untuk mengevaluasi persiapan dan persyaratan penggunaan hutan akan dibentuk. Hasil evaluasi tim itu nan-

tinya dibawa ke Kementerian Kehutanan," papar Taufik yang mewakili Menteri PU dalam Rapat Koordinasi Implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (11/6).

Sementara itu, Ketua Tim Kerja MP3EI Koridor Kalimantan yang juga merupakan Menteri Pertanian Suswono membenarkan realisasi pembangunan tol Balikpapan-Samarinda menemui kendala izin penggunaan hutan Manggar dan Bukit Suharto.

"Ada tumpang tindih kawasan hutan yaitu pada ruas dua sepanjang 8,11 kilometer yang melewati hutan lindung Manggar serta ruas dua dan tiga sepanjang 25,6 kilometer yang melewati kawasan konservasi hutan lindung Bukit Suharto," jelas Suswono. (am)